

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A'an Efendi dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum administrasi*, sinar Grafika, Jakarta.
- Andrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsi. *Pengawasan Hukum terhadap Apratur Negara*. Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Bagir Manan. 1995. *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*. Jakarta. Hlm 8 dalam Andrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Baihaqi, 2016, *Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan Dan Hubungannya Dengan Disiplin Pustakawan*, UPT Perpustakaan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi penelitian hukum*, Jakarta : PT Raja grafindo Persada
- E. Utrecht. 2016, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta Ichtiar Hlm 187 dalam Andrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta. Sinar Grafika.
- HR,Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta Sinar Grafika.

Hlm 77 mengutip Philipus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika

Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta : Mirra Buana Media

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung

Sujamto. 1986, *Beberapa Pengertian dibidang Pengawasan*. Balai Pustaka, Jakarta

Sution Usman Adji, 1991, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta

Rozali Abdullah, 2011, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, jakarta, Raja Grafindo Persada

Ranupandojo, B Siswanto, 1986, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administrasi dan Operasional*, Jakarta, Bumi Aksara

Skripsi

Jones parulian Nababan. 2018. *Penegakan Hukum Keberadaan Becak Motor Sebagai Angkutan Umum Di Kota Martapura*. Skripsi. Universitas Islam Kalimantan.

Shafira Melinda. 2022. *Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Aceh Terhadap Keberadaan Mobil Angkutan Ilegal Dalam Perspektif Al Hisbah*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Arraniry Banda Aceh.

Jurnal

Amin Rais Harahap, 2019, *Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Perizinan Angkutan Kota dalam Trayek Di Kota Medan*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Kezia M, 2020. *Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat Menurut UU Nomor 9 Tahun 2015*, Lex Administratum, Vol. VIII/No. 3.

Kiki Yunita Sari, Linayati Lestari, Nurhayati, 2019, *Analisis Fungsi Pengawasan Uji Berkala Oleh Dinas Perhubungan Kota Batam Terhadap Angkutan Kota*, Jurnal Dimensi, Volume 8 Nomor 3, Universitas Riau Kepulauan

Muhammad Syaiful Buamona dkk, 2017, *analisis pelayanan Tranportasi Angkutan Kota di Kota Ternate*, Volume 4 Nomor 3, Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Muhammad Roiyan Fadilah, & Waris Alqarni, 2022. *pengawasan dinas perhubungan kota banda aceh terhadap pelayanan parkir ditepi jalan umum kota banda aceh*. jurnal ilmiah Mahasiswa Fakultas ilmu Sosial & Ilmu Politik, Volume 7 no. 4.

R. Didi Djadjuli, 2015, *Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai*, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi

Negara, Volume 4 Nomor 4, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, Ciamis.

Ruhul Fata, dan Mahdi Syahbandir, 2018, *Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika Kota Banda Aceh Terhadap Kelayakan Dan Keamanan Angkutan Umum Darat Di Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Sugianto dan Muhammad Arief Kurniawan, 2020, *Tingkat Ketertarikan Masyarakat terhadap Transportasi Online, Angkutan Pribadi dan Angkutan Umum Berdasarkan Presepsi*, Jurnal Teknologi Transportasi dan Logistik, Volume 1 Nomor 2, Bali.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Artikel/Berita

Saldy Irawan, 9 Desember 2023, Kendaraan asal india menjamur di Makassar, Dishub tegaskan bajaj belum punya operasi izin, <https://makassar.tribunnews.com/2023/12/09/kendaraan-asal-india-menjamur-di-makassar-dishub-tegaskan-bajaj-belum-punya-izin-operasi>
Diakses pada 26 Februari 2024

Aswar, 13 Mei 2024, BPTS Kelas II Sulsel Kunker Dishub Makassar, Koordinasi Lanjutan Kolaborasi. <https://sulsel.rakyat.news/read/712619/bajaj-di-makassar-belum-pegang-izin-dishub-sulsel> Diakses pada 1 Maret 2024

Link sulsel, 15 juni 2024, Jadi Populer Alat Transportasi, Bajaj di Makassar Di duga Tak Kantongi Ijin Aspal, <https://linksatusulsel.com/jadi-populer-alat-transportasi-bajaj-di-makassar-di-duga-tak-kantongi-ijin-aspal/> (2024)
Diakses pada tanggal 17 Juli 24

L

A

M

P

I

R

A

N



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171
Website: dpmptsp.makassar.go.id



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 070/2612/SKP/SB/DPMTSP/6/2024

DASAR:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan
- Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023
- Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 15302/S.01/PTSP/2024, Tanggal 12 Juni 2024
- Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar nomor 2613/SKP/SB/BKBP/6/2024

Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama	:	MUHAMMAD SATRIAWANSYAH NASMAR
NTM / Jurusan	:	B021201029 / Hukum Administrasi Negara
Pekerjaan	:	Mahasiswa (S1) / Universitas Hasanuddin
Alamat	:	Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar
Lokasi Penelitian	:	Terlampir-
Waktu Penelitian	:	12 Juni 2024 - 12 Agustus 2024
Tujuan	:	Skripsi
Judul Penelitian	:	PENGAWASAN PENGOPRASIAN ANGKUTAN UMUM BAJAJ DI KOTA MAKASSAR

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
- Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan penelitian.
- Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email bidangkososbudkesbangpolmks@gmail.com.
- Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.



Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 2024-06-19 12:26:32

Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**
HELMIY BUDIMAN, S.STP., M.M.

Tembusan Kepada Yth:

- Pimpinan Lembaga/Instansi/Perusahaan Lokasi Penelitian;
- Pertinggal,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-nsw.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 18990/S.01/PTSP/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin penelitian

Kepada Yth.
DIRLANTAS POLDA SULSEL

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar Nomor : 011817/UN4.5.1/PT.01.04/2024 tanggal 11 Juni 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD SATRIAWANSYAH NASMAR
Nomor Pokok : B021201029
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PENGAWASAN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM BAJAJ DI KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 17 Juli s/d 30 September 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 17 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Terbitan Yth:
1. Dekan Fak. Hukum Univ. Hasanuddin Makassar di Makassar;
2. Bertinggal.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 17732/S.01/PTSP/2024 Kepada Yth.
Lampiran : - Kepala Dinas Perhubungan Provinsi
Perihal : Izin penelitian Sulawesi Selatan

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar Nomor : 010817/UN4.5/PT.01.04/2024 tanggal 11 Juni 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD SATRIAWANSYAH NASMAR
Nomor Pokok : B021201029
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PENGAWASAN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM BAJAJ DI KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **08 Juli s/d 06 September 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 08 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Terbacaan Yth
1. Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar di Makassar;
2. Bertinggal.

